

Bulan :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Tahun :

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

Media :

Halaman : 01

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Kompas  | Kalteng Pos | Borneo News |
| Palangka Post <input checked="" type="checkbox"/> | Tabengan    |             |

## Klinik Anggaran Wujud Transparansi

**PALANGKA RAYA, PPOST**

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menegaskan, pihaknya telah membuka klinik anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal itu dilakukan untuk mewujudkan transparansi hasil pemeriksaan BPK RI agar temuan yang sama tidak terulang di kemudian hari.

"Klinik APBD merupakan

wadah konsultasi bagi perangkat daerah," tegas Edy Pratowo saat menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Kalimantan Tengah pada rapat paripurna ke-7 yang berlangsung secara virtual, Rabu (14/7).

*Bersambung Ke Halaman 3*

Dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo menyatakan, pihaknya telah membuat perencanaan aksi untuk menindaklanjuti temuan BPK RI yang terdiri dari dokumen tindak lanjut, waktu pelaksanaan dan, organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab.

Terkait pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan soal perbedaan realisasi pendapatan pada LKPj (laporan keterangan pertanggungjawaban) dengan LPj (lapo-

ran pertanggungjawaban) tahun 2020, dijelaskannya bahwa dalam penyusunan LKPj sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, laporan disampaikan pada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga realisasi yang disajikan dalam LKPj menggunakan data sebelum dilakukan pemeriksaan. Sedangkan untuk realisasi menggunakan data setelah pemeriksaan yang telah dilampirkan penyesuaian-nya oleh BPK RI sebagaimana

tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

"Kami juga menyampaikan terima kasih atas masukan Fraksi PDI Perjuangan terkait regulasi refocusing tahun anggaran 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19. Meskipun ini menjadi dikresi pemerintah daerah, kami telah memberikan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD sebagaimana yang diamanatkan dalam permendagri," tukasnya.

Edy Pratowo mengatakan, pihaknya akan terus berinovasi

dalam rangka menggali potensi PAD (pendapatan asli daerah) melalui sektor pajak dan retribusi daerah. Pihaknya telah berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berinovasi, dan membuat keputusan dalam rangka menggali potensi penerimaan daerah tersebut. Dengan itu rasio penerimaan dan PAD akan semakin besar, diharapkan terciptanya kemandirian pengelolaan daerah yang akan berdampak terhadap kemajuan pembangunan dan kemakmuran

masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Edy Pratowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Gabungan atas apresiasi terhadap keberhasilan pemerintah daerah. Meski dalam kondisi pandemi Covid-19, namun roda pemerintahan dapat berlangsung dengan cukup baik.

"Apa yang kami kerjakan selama ini semoga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya. (ans/P2)